|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DRAF PERATURAN** | | **TANGGAPAN** | **USULAN PERUBAHAN** |
| **BATANG TUBUH** | **PENJELASAN** |
| PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA  NOMOR TAHUN 2025  TENTANG  PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN, DAN DANA PENSIUN  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, | PENJELASAN  ATAS  PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  NOMOR TAHUN 2025  TENTANG  PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN, DAN DANA PENSIUN |  |  |
|  |  |  |  |
| Menimbang: | 1. UMUM |  |  |
| 1. bahwa untuk mengharmonisasikan penerapan pengawasan berbasis risiko bagi perusahaan perasuransian, lembaga penjamin, dan dana pensiun, diperlukan ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan bagi lembaga penjamin; | Tingkat Kesehatan perusahaan perasuransian, lembaga penjamin, dan dana pensiun (PPDP) yang merupakan cerminan dari kondisi dan kinerja PPDP merupakan sarana bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap PPDP tersebut. |  |  |
| 1. bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank belum mengatur penilaian tingkat kesehatan bagi lembaga penjamin; | Perkembangan industri PPDP saat ini semakin kompleks dan bersifat dinamis. Hal tersebut berpengaruh pada risiko yang dihadapi oleh PPDP sehingga diperlukan metodologi penilaian Tingkat Kesehatan PPDP yang dapat mencerminkan kondisi PPDP saat ini dan pada waktu yang akan datang. |  |  |
| 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun; | Metodologi penilaian Tingkat Kesehatan PPDP harus dapat menjadi alat untuk mengevaluasi kinerja industri PPDP dengan penilaian yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil integrasi profil risiko serta kinerja yang meliputi tata kelola perusahaan yang baik, rentabilitas, kemampuan permodalan, dan/atau pendanaan. Hal ini dimaksudkan agar PPDP dapat terus menjaga tingkat kesehatannya dengan memperhitungkan seluruh faktor cakupan penilaian. |  |  |
|  | Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), bidang pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dipisah menjadi 2 (dua), yaitu bidang pengawasan perasuransian, dana pensiun dan penjaminan; dan bidang pengawasan lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya. |  |  |
|  |  |  |  |
| Mengingat: |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); | Otoritas Jasa Keuangan juga telah meluncurkan peta jalan pengembangan dan penguatan industri penjaminan pada tahun 2024 yang memiliki tujuan pengembangan perusahaan penjaminan secara khusus terkait penerapan pengawasan berbasis risiko bagi lembaga penjamin. |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); | Pengawasan terhadap lembaga penjamin saat ini masih menggunakan pengawasan berdasarkan kepatuhan (*compliance based supervision*) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank belum mengatur penilaian tingkat kesehatan bagi lembaga penjamin, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan. |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  |
|  |  |  |  |
| MEMUTUSKAN: |  |  |  |
| Menetapkan: |  |  |  |
| PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN, DAN DANA PENSIUN. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| KETENTUAN UMUM |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 1  Cukup jelas. |  |  |
| Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: |  |  |  |
| * 1. Perusahaan perasuransian, lembaga penjamin, dan dana pensiun yang selanjutnya disingkat PPDP adalah lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, penjaminan dan dana pensiun. |  |  |  |
| * 1. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi PPDP yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi PPDP yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, perusahaan umum, dan dana pensiun. |  |  |  |
| * 1. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi PPDP yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi PPDP yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, perusahaan umum, dan dana pensiun. |  |  |  |
| * 1. Tingkat Kesehatan PPDP adalah hasil penilaian kondisi PPDP yang dilakukan terhadap tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan atau pendanaan. |  |  |  |
| * 1. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan PPDP. |  |  |  |
| * 1. Perusahaan Anak adalah perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh PPDP secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. |  |  |  |
| * 1. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 2  Cukup jelas. |  |  |
| PPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi: |  |  |  |
| 1. perusahaan perasuransian, terdiri atas: |  |  |  |
| * 1. perusahaan asuransi, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah; |  |  |  |
| * 1. perusahaan reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah; |  |  |  |
| * 1. perusahaan asuransi syariah; dan |  |  |  |
| * 1. perusahaan reasuransi syariah, |  |  |  |
| sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian; |  |  |  |
| 1. lembaga penjamin, terdiri atas: |  |  |  |
| 1. perusahaan penjaminan; |  |  |  |
| 1. perusahaan penjaminan syariah; |  |  |  |
| 1. perusahaan penjaminan ulang; dan |  |  |  |
| 1. perusahaan penjaminan ulang syariah, |  |  |  |
| sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan; |  |  |  |
| 1. dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| TINGKAT KESEHATAN PPDP |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |
| Umum |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 3 |  |  |
| 1. PPDP wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan PPDP dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. | Ayat (1)  Tingkat Kesehatan PPDP dipelihara dan/atau ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap PPDP dapat tetap terjaga. Selain itu, Tingkat Kesehatan PPDP digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi PPDP serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan PPDP, baik berupa tindakan perbaikan oleh PPDP maupun tindakan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan PPDP serta mengambil langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | Ayat (2)  Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris untuk memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan PPDP mengacu pada kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik. |  |  |
| 1. PPDP wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan PPDP dengan menggunakan pendekatan risiko secara individual. | Ayat (3)  Pendekatan risiko dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif terhadap kinerja, profil risiko, permasalahan yang dihadapi, dan prospek perkembangan PPDP. |  |  |
| 1. Dalam hal PPDP melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak, selain melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPDP wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko secara konsolidasi. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. PPDP yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan unit syariah, unit usaha syariah, atau unit usaha penjaminan dengan menggunakan pendekatan secara individual. | Ayat (5)  Penilaian tingkat kesehatan unit syariah, unit usaha syariah, atau unit usaha penjaminan secara individual merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penilaian Tingkat Kesehatan PPDP yang menjadi induknya. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 4 |  |  |
| 1. PPDP wajib melakukan penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan PPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sampai dengan ayat (5) | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penilaian sendiri Tingkat Kesehatan PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Selain melakukan penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPDP wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan PPDP apabila diperlukan. | Ayat (3)  Pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan PPDP dilakukan antara lain apabila:   1. kondisi keuangan PPDP memburuk; 2. terdapat faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi Tingkat Kesehatan PPDP secara signifikan; atau 3. kondisi lainnya yang menurut Otoritas Jasa Keuangan dan/atau PPDP perlu dilakukan pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan PPDP. |  |  |
| 1. Hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib mendapat persetujuan Direksi. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris. | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. PPDP wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan PPDP kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat: | Ayat (6)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau |  |  |  |
| 1. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3). |  |  |  |
| 1. Apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a jatuh pada hari libur, hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan PPDP disampaikan pada hari kerja berikutnya | Ayat (7)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 5 |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian Tingkat Kesehatan PPDP setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan PPDP apabila diperlukan. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penilaian Tingkat Kesehatan PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan PPDP, dan/atau informasi lain. | Ayat (3)  Yang dimaksud dengan “informasi lain” adalah informasi yang secara signifikan akan memengaruhi hasil penilaian Tingkat Kesehatan PPDP.  Informasi lain antara lain berupa:   1. informasi dari komisaris independen; 2. informasi dari *whistle blower*; 3. informasi hasil penilaian dari otoritas lain yang berwenang; dan 4. informasi yang diketahui secara umum seperti hasil penilaian dari lembaga pemeringkat dan informasi dari media massa. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 6  Cukup jelas. |  |  |
| Dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan PPDP yang dilakukan oleh PPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan PPDP yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yang berlaku hasil penilaian Tingkat Kesehatan PPDP yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Sanksi Administratif |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 7  Cukup jelas. |  |  |
| 1. PPDP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 4 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan/atau ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa: |  |  |  |
| 1. peringatan tertulis; dan/atau |  |  |  |
| 1. penurunan tingkat kesehatan. |  |  |  |
| 1. PPDP yang dinyatakan terlambat menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan PPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari. |  |  |  |
| 1. PPDP yang tidak menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan PPDP dihitung 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), dinyatakan tidak menyampaikan menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan PPDP. |  |  |  |
| 1. PPDP yang dinyatakan tidak menyampaikan hasil penilaain sendiri Tingkat Kesehatan PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 8  Cukup jelas. |  |  |
| Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama PPDP. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| MEKANISME PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PPDP SECARA INDIVIDUAL |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 9  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penilaian Tingkat Kesehatan PPDP secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) bagi perusahaan perasuransian dan lembaga penjamin, dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut: |  |  |  |
| 1. tata kelola perusahaan yang baik; |  |  |  |
| 1. profil risiko; |  |  |  |
| 1. rentabilitas; dan |  |  |  |
| 1. permodalan. |  |  |  |
| 1. Penilaian Tingkat Kesehatan PPDP secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) bagi dana pensiun pemberi kerja, dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut: |  |  |  |
| 1. tata kelola perusahaan yang baik; |  |  |  |
| 1. profil risiko; |  |  |  |
| 1. rentabilitas; dan |  |  |  |
| 1. pendanaan. |  |  |  |
| 1. Penilaian Tingkat Kesehatan PPDP secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) bagi dana pensiun lembaga keuangan, dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut: |  |  |  |
| 1. tata kelola perusahaan yang baik; |  |  |  |
| 1. profil risiko; dan |  |  |  |
| 1. rentabilitas; |  |  |  |
| 1. Penilaian tingkat kesehatan unit syariah, unit usaha syariah, atau unit usaha penjaminan secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) mencakup penilaian terhadap faktor profil risiko. |  |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian Tingkat Kesehatan PPDP secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 10 |  |  |
| 1. Penilaian terhadap faktor tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a, merupakan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh PPDP. | Ayat (1)  Prinsip tata kelola perusahaan yang baik mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi PPDP dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha masing-masing PPDP. |  |  |
| 1. Penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, dan ayat (4) merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional PPDP yang dilakukan terhadap 10 (sepuluh) risiko yaitu: | Ayat (2)  Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko melekat pada kegiatan bisnis PPDP, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan PPDP. |  |  |
| 1. risiko strategis; |  |  |  |
| 1. risiko operasional; |  |  |  |
| 1. risiko asuransi, bagi perusahaan perasuransian; |  |  |  |
| 1. risiko penjaminan, bagi lembaga penjamin; |  |  |  |
| 1. risiko kredit; |  |  |  |
| 1. risiko pasar; |  |  |  |
| 1. risiko likuiditas; |  |  |  |
| 1. risiko hukum; |  |  |  |
| 1. risiko kepatuhan; dan |  |  |  |
| 1. risiko reputasi. |  |  |  |
| 1. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi PPDP. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf c paling sedikit memuat penilaian terhadap: | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. kinerja rentabilitas; |  |  |  |
| 1. sumber rentabilitas; dan |  |  |  |
| 1. kesinambungan rentabilitas PPDP. |  |  |  |
| 1. Penilaian terhadap faktor permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d paling sedikit memuat penilaian terhadap: | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. tingkat kecukupan permodalan; dan |  |  |  |
| 1. pengelolaan permodalan. |  |  |  |
| 1. Penilaian terhadap faktor pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d paling sedikit memuat penilaian terhadap: | Ayat (6)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. kondisi pendanaan; dan |  |  |  |
| 1. tambahan pendanaan. |  |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian terhadap faktor tata kelola perusahaan yang baik, faktor profil risiko, faktor rentabilitas, faktor permodalan, dan faktor pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (7)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 11 |  |  |
| 1. Setiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan PPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan peringkatnya berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai berikut: | Ayat (2)  Urutan peringkat faktor yang lebih kecil mencerminkan kondisi PPDP yang lebih baik. |  |  |
| 1. peringkat 1; |  |  |  |
| 1. peringkat 2; |  |  |  |
| 1. peringkat 3; |  |  |  |
| 1. peringkat 4; dan |  |  |  |
| 1. peringkat 5. |  |  |  |
| 1. Penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik PPDP dan informasi lain yang terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik PPDP. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); |  |  |  |
| 1. penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit; dan |  |  |  |
| 1. penetapan peringkat faktor profil risiko berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan. |  |  |  |
| 1. Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi rentabilitas PPDP. | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penetapan peringkat faktor permodalan dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi permodalan perusahaan perasuransian dan lembaga penjamin. | Ayat (6)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penetapan peringkat faktor pendanaan dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator pendanaan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi pendanaan dana pensiun pemberi kerja. | Ayat (7)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik, faktor profil risiko, faktor rentabilitas, faktor permodalan, dan faktor pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (8)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 12 |  |  |
| 1. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan PPDP ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) sampai dengan ayat (7) dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Peringkat Komposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai berikut: | Ayat (2)  Urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan kondisi PPDP yang lebih sehat. |  |  |
| 1. Peringkat Komposit 1; |  |  |  |
| 1. Peringkat Komposit 2; |  |  |  |
| 1. Peringkat Komposit 3; |  |  |  |
| 1. Peringkat Komposit 4; dan |  |  |  |
| 1. Peringkat Komposit 5. |  |  |  |
| 1. Peringkat Komposit 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencerminkan kondisi PPDP yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. | Ayat (3)  Kondisi yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain, tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, permodalan, dan/atau pendanaan yang secara umum sangat baik. Jika terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan. |  |  |
| 1. Peringkat Komposit 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencerminkan kondisi PPDP yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. | Ayat (4)  Kondisi yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain, tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, permodalan, dan/atau pendanaan yang secara umum baik. Jika terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan. |  |  |
| 1. Peringkat Komposit 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mencerminkan kondisi PPDP yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. | Ayat (5)  Kondisi yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain, tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, permodalan, dan/atau pendanaan, yang secara umum cukup baik. Jika terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan jika tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha PPDP. |  |  |
| 1. Peringkat Komposit 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, mencerminkan kondisi PPDP yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. | Ayat (6)  Kondisi yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain, tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, permodalan, dan/atau pendanaan, yang secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan yang secara umum signifikan dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu kelangsungan usaha PPDP. |  |  |
| 1. Peringkat Komposit 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, mencerminkan kondisi PPDP yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. | Ayat (7)  Kondisi yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain, tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, permodalan, dan/atau pendanaan, yang secara umum tidak baik. Terdapat kelemahan yang secara umum sangat signifikan sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan dukungan dana dari pemegang saham atau sumber dana dari pihak lain untuk memperkuat kondisi keuangan PPDP. |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (8)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| MEKANISME PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PPDP SECARA KONSOLIDASI |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |
| Umum |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 13 |  |  |
| 1. Penilaian Tingkat Kesehatan PPDP secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) bagi perusahaan perasuransian dan lembaga penjamin, dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut: | Ayat (1)  Penilaian Tingkat Kesehatan PPDP dengan menggunakan pendekatan risiko dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif terhadap kinerja, profil risiko, permasalahan yang dihadapi, dan prospek perkembangan PPDP. Penilaian terhadap masing-masing faktor dilakukan secara konsolidasi antara PPDP dengan Perusahaan Anak. |  |  |
| 1. tata kelola perusahaan yang baik; |  |  |  |
| 1. profil risiko; |  |  |  |
| 1. rentabilitas; dan |  |  |  |
| 1. permodalan. |  |  |  |
| 1. Penilaian Tingkat Kesehatan PPDP secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) bagi dana pensiun pemberi kerja, dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut: | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. tata kelola perusahaan yang baik; |  |  |  |
| 1. profil risiko; |  |  |  |
| 1. rentabilitas; dan |  |  |  |
| 1. pendanaan. |  |  |  |
| 1. Penilaian Tingkat Kesehatan PPDP secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) bagi dana pensiun lembaga keuangan, dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut: | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. tata kelola perusahaan yang baik; |  |  |  |
| 1. profil risiko; dan |  |  |  |
| 1. rentabilitas; |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 14 |  |  |
| 1. Penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan: | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap PPDP secara konsolidasi; dan |  |  |  |
| 1. permasalahan pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsolidasi. |  |  |  |
| 1. Penetapan peringkat faktor profil risiko secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan: | Ayat (2)  Risiko Perusahaan Anak yang dinilai untuk pengukuran profil risiko secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik usaha Perusahaan Anak dan pengaruhnya terhadap profil risiko PPDP secara konsolidasi. Pengukuran tingkat risiko secara konsolidasi dilakukan dengan menggunakan parameter pengukuran risiko yang sesuai dengan karakteristik usaha Perusahaan Anak. |  |  |
| 1. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap PPDP secara konsolidasi; dan |  |  |  |
| 1. permasalahan pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil risiko secara konsolidasi. |  |  |  |
| 1. Penetapan peringkat faktor rentabilitas secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan PPDP secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan: | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap PPDP secara konsolidasi; dan |  |  |  |
| 1. permasalahan pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas secara konsolidasi. |  |  |  |
| 1. Penetapan peringkat faktor permodalan secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan perusahaan perasuransian dan lembaga penjamin secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan: | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap PPDP secara konsolidasi; dan |  |  |  |
| 1. permasalahan pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap permodalan secara konsolidasi. |  |  |  |
| 1. Penetapan peringkat faktor pendanaan secara konsolidasi dilakukan dengan mengacu pada penilaian Tingkat Kesehatan PPDP secara individual terhadap faktor pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6). | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik, faktor profil risiko, faktor rentabilitas, faktor permodalan, dan faktor pendanaan secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (6)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 15  Cukup jelas. |  |  |
| Bagi PPDP yang melakukan penilaian Tingkat Kesehatan PPDP secara konsolidasi: |  |  |  |
| 1. mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan PPDP secara konsolidasi; dan |  |  |  |
| 1. pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian dan Peringkat Komposit secara konsolidasi, |  |  |  |
| wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat PPDP secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Sanksi Administratif |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 16  Cukup jelas. |  |  |
| PPDP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi administratif berupa: |  |  |  |
| 1. peringatan tertulis; dan/atau |  |  |  |
| 1. penurunan tingkat kesehatan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 17  Cukup jelas. |  |  |
| Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama PPDP. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PPDP |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |
| Umum |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 18 |  |  |
| 1. Dalam hal hasil penilaian Tingkat Kesehatan PPDP terdapat: | Ayat (1)  Yang dimaksud dengan “hasil penilaian Tingkat Kesehatan PPDP” adalah hasil penilaian Tingkat Kesehatan PPDP yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil penilaian sendiri. |  |  |
| 1. peringkat faktor penilaian Tingkat Kesehatan PPDP yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5; |  |  |  |
| 1. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan PPDP yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5; dan/atau |  |  |  |
| 1. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan PPDP yang ditetapkan dengan peringkat 3, namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha PPDP, |  |  |  |
| PPDP wajib menyampaikan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal hasil penilaian tingkat kesehatan unit syariah, unit usaha syariah, atau unit usaha penjaminan memperoleh hasil penilaian faktor profil risiko dengan peringkat 4 atau peringkat 5, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan ulang, atau dana pensiun yang memiliki unit syariah unit syariah, unit usaha syariah, atau unit usaha penjaminan wajib menyampaikan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (2)  Yang dimaksud dengan “hasil penilaian tingkat kesehatan unit syariah, unit usaha syariah, atau unit usaha penjaminan” adalah hasil penilaian tingkat kesehatan unit syariah, unit usaha syariah, atau unit usaha penjaminan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil penilaian sendiri.  Yang dimaksud dengan “rencana tindak” adalah rencana tindak atas tingkat kesehatan unit syariah, unit usaha syariah, atau unit usaha penjaminan. |  |  |
| 1. Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan komitmen PPDP kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling sedikit memuat langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh PPDP untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi beserta target waktu penyelesaiannya. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta PPDP untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. PPDP wajib menyampaikan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2): | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian Tingkat Kesehatan PPDP oleh Otoritas Jasa Keuangan disampaikan sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau |  |  |  |
| 1. untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian sendiri PPDP disampaikan paling lambat: |  |  |  |
| * 1. pada tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan PPDP posisi akhir bulan Desember; atau |  |  |  |
| * 1. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengkinian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan PPDP. |  |  |  |
| 1. Apabila batas waktu penyampaian rencana tindak atas hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 1 jatuh pada hari libur, hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan PPDP disampaikan pada hari kerja berikutnya. | Ayat (6)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 19  Cukup jelas. |  |  |
| 1. PPDP wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) paling lambat: |  |  |  |
| 1. 10 (sepuluh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak; dan/atau |  |  |  |
| 1. 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir bulan dan dilakukan secara bulanan, apabila terdapat permasalahan yang signifikan yang akan mengganggu penyelesaian rencana tindak secara tepat waktu. |  |  |  |
| 1. Laporan pelaksanaan rencana tindak yang disampaikan oleh PPDP paling sedikit memuat penjelasan mengenai realisasi pelaksanaan rencana tindak, disertai bukti pelaksanaan dan/atau dokumen pendukung terkait. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 20  Cukup jelas. |  |  |
| Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan rencana tindak oleh PPDP. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Sanksi Administratif |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 21  Cukup jelas. |  |  |
| 1. PPDP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (5), Pasal 19 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa: |  |  |  |
| 1. peringatan tertulis; dan/atau |  |  |  |
| 1. penurunan tingkat kesehatan. |  |  |  |
| 1. PPDP yang dinyatakan terlambat menyampaikan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) dan laporan pelaksanaan rencana rindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari. |  |  |  |
| 1. PPDP yang tidak menyampaikan rencana tindak dan laporan pelaksanaan rencana tindak dihitung 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 19 ayat (1), dinyatakan tidak menyampaikan menyampaikan rencana tindak dan laporan pelaksanaan rencana tindak. |  |  |  |
| 1. PPDP yang dinyatakan tidak menyampaikan rencana tindak dan laporan pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 22  Cukup jelas. |  |  |
| Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama PPDP. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| TATA CARA PENYAMPAIAN |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 23  Cukup jelas. |  |  |
| 1. PPDP harus menyampaikan: |  |  |  |
| 1. hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan PPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5); |  |  |  |
| 1. rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5); dan |  |  |  |
| 1. laporan pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), |  |  |  |
| secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian hasil penilaian sendiri, rencana tindak, dan laporan pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan PPDP, rencana tindak, dan laporan pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| KETENTUAN LAIN-LAIN |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 24  Cukup jelas. |  |  |
| Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| KETENTUAN PERALIHAN |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 25  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Hasil penilaian Tingkat Kesehatan PPDP berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dinyatakan tetap berlaku sampai dengan disampaikannya laporan hasil penilaian Tingkat Kesehatan PPDP. |  |  |  |
| 1. Bagi lembaga penjamin yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, ketentuan mengenai kewajiban untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dinyatakan berlaku 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 26  Cukup jelas. |  |  |
| Pemenuhan persyaratan Tingkat Kesehatan bagi lembaga penjamin dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan usaha lembaga penjamin mengacu pada hasil penilaian Tingkat Kesehatan PPDP berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan peraturan pelaksanaannya. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| KETENTUAN PENUTUP |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 27  Cukup jelas. |  |  |
| Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: |  |  |  |
| 1. pengaturan tingkat kesehatan bagi perusahaan perasuransian dan dana pensiun, tunduk pada Peeraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; |  |  |  |
| 1. peraturan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6504) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan |  |  |  |
| 1. Pasal 56 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor XXX Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor XX, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor XXX), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 28  Cukup jelas. |  |  |
| Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Ditetapkan di Jakarta  pada tanggal  KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  MAHENDRA SIREGAR |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Diundangkan di Jakarta  pada tanggal  MENTERI HUKUM  REPUBLIK INDONESIA,    SUPRATMAN ANDI AGTAS  LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ... |  |  |  |